

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

PUTUSSIBAU 2021



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan di tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu 2021 - 2026.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 merupakan rencana kinerja tahun pertama yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu 2021 - 2026. Renja Dinas Perhubungan menggambarkan target kinerja tahun 2022 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Renja Dinas Perhubungan ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini.

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

RUDI HARTONO,SE,M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19610818 199403 1 001

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	2
	D. Sistematika Penulisan	2
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.....	4
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2020.....	4
	B. Perkiraan Pencapaian Tahun 2021.....	9
	B. Evaluasi Capaian Renstra	14
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	20
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	23
BAB III	TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	25
	A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	25
	B Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN.....	35
BAB V	PENUTUP.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun 2022 dengan memperhatikan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Tahun 2022 yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia, peningkatan ekonomi sektor unggulan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan dalam rangka mempersiapkan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Tahun 2022. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Perumusan Program dan kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Dinas Perhubungan. Rencana Kerja Tahun 2022 juga dirumuskan untuk mensinkron dalam rangka menunjang visi, misi Kepala Daerah tahun 2022.

1. 2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan pada Tahun 2022 mengacu kepada:

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang –Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9)

- sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleggaran Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan angka menengah daerah serta tata cara perubahan serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;

1. 3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud :

penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

2) Tujuan penyusunan Renja :

- 1) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
- 2) Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

2. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari :

- A. Latar Belakang,
- B. Landasan Hukum,
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU terdiri dari:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 dan perkiraan Tahun 2021 serta Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2022

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020
- B. Perkiraan Pencapaian Tahun 2021
- C. Evaluasi Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN terdiri dari :

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan,
- C. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN.

BAB V PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN ANGGARAN 2020

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 dan perkiraan Tahun 2021 serta Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2022

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja 2020 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2021. Pada pelaksanaan kegiatan 2020 secara umum Dinas Perhubungan telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi.

Tujuan pembangunan Dinas Perhubungan telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2022, Dinas Perhubungan memiliki visi : Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih
2. Meningkatkan Layanan Infrastruktur dasar dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Dinas Perhubungan disusun dalam kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Dinas Perhubungan. Adapun reprenstasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Dinas Perhubungan.

A. Evaluasi Pelaksanaa Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020

Atas dasar telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan maka capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja. Hal yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator kinerja tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh bagian yang terdapat di lingkup Dinas Perhubungan dengan berbagai program dan kegiatan yang ada.

Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2020 telah terealisasi sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian % Keuangan	Capaian % Kinerja
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.177.422.360,00			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.126.900,00	4.123.500,00	99,92	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	52.680.000,00	51.445.892,00	97,66	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan	12.000.000,00	9.208.600	76,74	100
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	104.480.000,00	104.480.000,00	100	100
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	79.960.000,00	79.960.000,00	100	100
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	29.900.000,00	29.900.000,00	100	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.102.000,00	37.102.000,00	100	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.640.000,00	25.640.000,00	100	100
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.529.000,00	3.529.000,00	100	100
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	11.000.000,00	11.000.000,00	100	100
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.600.000,00	50.600.000,00	100	100
12	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	189.239.820,00	189.209.810,00	100	100
13	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	161.330.000,00	161.330.000,00	100	100

14	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	72.487.640,00	71.658.640,00	98,86	100
15	Penyusunan RKA dan DPA	2.447.000,00	2.447.000,00	100	100
16	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	309.600.000,00	309.600.000,00	100	100
17	Penyediaan Jasa Publikasi	7.500.000,00	7.500.000,00	100	100
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	608.700.000,00			
18	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	146.000.000,00	145.728.000,00	99,81	100
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	215.000.000,00	215.000.000,00	99,76	100
20	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional	247.700.000,00	247.699.850,00	100	100
III	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	127.400.000,00			
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	88.200.000,00	88.154.000,00	99,95	100
22	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	39.200.000,00	39.160.000,00	99,90	100
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	78.983.000,00			
23	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.590.000,00	2.590.000,00	100	100
24	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	52.657.000,00	52.657.000,00	100	100
25	Penyusunan Renja Dishub	19.263.000,00	19.263.000,00	100	100
26	Penyusunan LPPD	2.510.000,00	2.510.000,00	100	100
VI	Peningkatan Pelayanan Angkutan	613.775.825,00			
27	Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	287.472.825,00	287.411.516,00	99,98	100
28	Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan	122.340.000,00	122.320.000,00	99,98	100

	Sungai dan Danau				
29	Manajemen lalu lintas angkutan sungai dan danau	92.000.000,00	91.999.000,00	100	100
30	Pemeliharaan/rehabilitas Fasilitas ASDP	26.000.000,00	26.000.000,00	100	100
31	Pelayanan KIR Keliling	7.370.000,00	7.370.000,00	100	100
32	Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Lokasi Parkir	22.398.000,00	22.398.000,00	100	100
33	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas Darat	19.000.000,00	19.000.000,00	100	100
34	Penyusunan Perda tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyeberangan	18.600.000,00	18.600.000,00	100	100
34	Penyusunan Perda tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyeberangan	18.595.000,00	18.595.000,00	100	100
VII	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	382.300.000,00			
34	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	84.050.000,00	83.741.000,00	99,77	100
35	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	298.250.000,00	297.692.000,00	99,81	100
VIII	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3.142.450.000,00			
37	Pengadaan Rambu rambu lalu Lintas Darat	1.286.450.000,00	1.284.403.700,00	99,84	100
38	Penyediaan Lampu Jalan Kota	1.856.000.000,00	1.851.868.190,00	99,78	100
		6.003.631.185,00			

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perhubungan 2020

Dinas Perhubungan merupakan salah satu SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel II berikut.

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada Tabel II.

Tabel II
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Nilai IKM	85 %	75
	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	< 10	100
	% Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	75%	107
	% Angkutan Umum LAIK jalan	59%	90

□ Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020: Rp. **5.522.331.185,00**

2. Pendapatan

Dinas Perhubungan merupakan salah satu SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel III :

Tabel II
Target dan Realisasi PAD Tahun 2020

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	35.000.000,00	43.300.000,00	127%
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	22.460.000,00	125%
3	Retribusi Terminal	10.000.000,00	8.160.000,00	82%
4	Retribusi Pelabuhan	15.000.000,00	18.564.000,00	124%
5	Retribusi Penyeberangan Air	45.000.000,00	45.000.000,00	100%
6	Retribusi Ijin Trayek	5.000.000,00	5.300.000,00	106%
Jum		128.000.000,00	142.784.000,00	111%

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada Tabel IV.

Tabel IV
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	B
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79%	75%
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	70%	75%
		% Angkutan Umum LAIK jalan	85%	80%

B. Perkiraan Pencapaian Tahun 2020

Sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2022, maka program Dinas perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan visi dan misi Untuk mencapai tujuan Pelaksanaan Penyelenggaraan

tugas pemerintah di bidang Perhubungan, perlu diterapkan sasaran dan target program yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Sasaran/target program dimaksud dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang termuat dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan kerja (RKA) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahunan Dinas.

Rencana Target Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel IV berikut:

Tabel IV
Target Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja	Target
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.276.000,00	Prosentase Surat menyurat	100 %
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	88.800.000,00	Terbayar Jasa komunikasi, air listrik	12 bulan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional untuk menunjang kelancaran pelayanan	5 unit
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.100.000,00	Terbayarnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	17 orang
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	87.960.000,00	Tersedianya penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan	9 orang

			kantor	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	29.900.000,00	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	47 unit
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.102.000,00	Tersedianya kelengkapan alat tulis kantor	12 bulan
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.940.000,00	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.529.000,00	Prosentase tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 %
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	23.800.000,00	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12.000.000,00	Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.600.000,00	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan
13	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	196.438.100,00	jumlah pegawai rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39 orang
14	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	108.780.000,00	Tercapainya jumlah pegawai	100 orang

			kunjungan kerja dalam daerah	
15	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	99.850.000,00	Prosentase terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa	100%
16	Penyusunan RKA dan DPA	2.447.000,00	Tersedianya dokumen RKA dan DPA	3 Dok
17	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	289.800.000,00	Tersedianya jasa pendukung kantor	14 orang
18	Penyediaan Jasa Publikasi	7.500.000,00	Prosentase Tersedianya jasa publikasi	100 %
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
18	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	146.000.000	Prosentase tersedianya sarana pendukung kantor	100%
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	215.000.000	Prosentase tersedianya sarana pendukung kantor	100
20	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional	253.000.000,00	Prosentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	100%
III	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur			
21	Pendidikan dan pelatihan Formal	79.000.000,00	jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 orang
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian			

	kinerja dan keuangan			
22	Penyusunan LAKIP DISHUB	1.963.000,00	Tersedianya Dokumen LAKIP	1 dok
23	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.590.000,00	Tersedianya laporan akhir tahun	1 dok
24	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	36.457.000,00	Tersedianya dokumen pengelolaan aset	2 persil
25	Penyusunan RENJA DISHUB	19.263.000,00	Tersedianya RENJA	1 dok
26	Penyusunan LPPD	2.510.000,00	Tersedianya LPPD	1 dok
V	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
27	Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	200.004.000,00	Terselenggara nya Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	12 bulan
28	Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	113.000.000,00	Terlaksanan ya Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	12 bulan
29	Manajemen lalu lintas angkutan sungai dan danau	113.000.000,00	Tertibnya Perizinan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	10 ijin
30	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	49.000.000,00	Terpilihnya jumlah pelajar pelopor keselamatan LLAJ	3 orang
31	Pemeliharaan/rehabilitas Fasilitas ASDP	38.000.000,00	Terpeliharanya jumlah fasilitas umum ASDP	5 unit
32	Pelayanan KIR Keliling	41.000.000,00	Terselenggar	100 unit

			anya jumlah kecamatan yang dilaksanakan KIR keliling	
33	Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Lokasi Parkir	106.000.000,00	Terselenggaranya keamanan hari-hari besar keagamaan dan lokasi parkir	12 bulan
34	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas Darat	19.000.000,00	Terpeliharanya jumlah fasilitas umum ASDP	3 unit
35	Peyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Perubahan PERDA No. 7 Tahun 2015, No 3 Tahun 2013 dan No. 4 Tahun 2013)	156.740.000,00	Tersusunnya PERDA	3 perda
36	Peyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyebrangan (Perubahan PERDA No.8 Tahun 2015, No 9 Tahun 2015)	136.000.000,00	Tersusunnya PERDA	2 perda
VII	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
37	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	37.050.000,00	Terbangunnya Terminal	1 unit
38	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	345.250.000,00	Terbangunnya tambatan perahu	4 unit
39	Pengadaan Mobil Angkutan Pendesaan (ANGKUDes) dan DAK	1.174.500.000,00	Tersedianya angkudes	4 unit
VIII	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	880.000.000,00		
40	Pengadaan Rambu rambu lalu Lintas Darat	1.286.450.000,00	Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas	10 paket
41	Penyediaan Lampu Jalan Kota	1.991.000.000,00	Tersedianya lampu jalan	7 paket

			kota	
IX	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	880.000.000,00		
42	Pengadaan alat-alat KIR Bermotor	42.900.000,00	Jumlah Buku KIR	1.300 buku dan 1.300 stiker
		7.795.100.000,00		

C. Evaluasi Capaian Renstra

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Kapuas Hulu sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel V.

Tabel V
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan	Indikator Kinerja (out come) Program Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2020	
								Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				URUSAN WAJIB									
1	02	09		PERHUBUNGAN									
			01	Program Peningkatan Pelayanan	Capaian peningkatan pelayanan angkutan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Registrasi dan Pendataan Kendaraan Motor	Tersediannya data regitsrasi dan data motor air	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			2	Pengawasan dan Patroli Lalu Lintas	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			3	Pengawasan dan Patroli Sungai dan Danau	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalur Sungai dan Danau	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			4	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan bagi Masyarakat pengguna jalur Air	5	5	5	5	100%	5	5	100%
			5	Pengoperasiaan Bus Sekolah	Terlaksananya angkutan sekolah	2	2	2	2	100%	2	2	8%

			6	Pelayanan KIR Keliling	Terlayannya pengguna jasa KIR di Kecamatan	60	12	12	12	100%	12	12	1000%
			7	Pemilihan Pelajar Pelopor	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	2	2	2	2	100%	2	2	100%
			02	Pembangunan Sarana dan	Capaian peningkatan pelayanan angkutan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung	Tersedianya Halte untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan	200	84	23	23	100%	30	30	15%
			2	Pengadaan Angkutan Pedesaan (ANGKUIDES)	Terlaksananya Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan	23	1	5	1	20%	10	5	22%
			3	Penyediaan Jasa Konsultasi dan Perencanaan	Tersedianya Data Desain Kelayakan Dermaga	5	1	4	1	25%	5	5	100%
	03	03		Pengendalian dan Pengamanan	Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pengadaan Rambu rambu	Terpasangnya rambu-rambu sungai dan danau	400	75	23	23	100%	50	40	10%
			2	Pengadaan Rambu rambu	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalan	1200	345	165	165	100%	100	165	14%
	04	04		Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan	Capaian Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pengadaan Alat-alat KIR	Tersedianya Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor	20	8	8	8	100%	5	8	40%
	05	05		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%

		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		2	Penyusunan Pelaporan	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		3	Penyusunan Rencana	Terlaksananya Penyusunan RENSTRA DISHUB	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		4	Pendataan dan Pengelolaan	Tersusunnya data asset DISHUB	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		5	Penyusunan Rencana Kerja	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		6	Pemantuan dan Pengendalian	Terlaksanakannya Pemantauan dan Pengendalian Program kerja	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		7	Penyusunan Pembuatan Sertifikat	Terlaksanakannya Pembuatan Sertifikat Tanah terminal dan balik nama	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	06	06	Peningkatan Kapasitas	Capaian Peningkatan Kapasitas	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
		1	Pendidikan dan pelatihan Formal	Meningkatnya kemampuan Aparatur Dishub								
	07	07	Peningkatan Sarana dan	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
		1	Pemeliharaan Rutin / Berkala	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pekerjaan kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	08	08	Pelayanan Administrasi	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100%	12	12	100%

			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Terpenuhi Kebutuhan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Terlaksananya Kelengkapan Surat menyurat Kendaraan Dinas/Operasional	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			4	Penyediaan Jasa	Prosentase kegagalan dalam pelaksanaan administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			5	Penyediaan Jasa Pengamanan	Terwujudnya kebersihan Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			6	Penyediaan Jasa Perbaikan	Meningkatnya kualitas sarana kerja agar lebih produktif	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			7	Penyediaan Alat Tulis	Terwujudnya Peningkatan Administrasi Perkantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			8	Penyediaan Barang Cetak	Terwujudnya tingkat kecukupan kebutuhan kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			9	Penyediaan Komponen Instalasi	Terlaksannanya Peningkatan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			10	Penyediaan Peralatan dan	Tingkat kecukupan tersedianya peralatan dan perlengkapan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Terpenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			12	Penyediaan Makanan dan	Terwujudnya pemenuhan atas kebutuhan makan dan minum	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			13	Rapat-Rapat Koordinasi &	Tingkat kesesuaian pelaksana tugas pokok dan fungsi	60	12	12	12	100%	12	12	100%

		14	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		15	Penyediaan Administrasi Pengadaan	Prosentase kegagalan pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		16	Penyusunan RKA dan DPA	Meningkatnya kesesuaian sasaran dengan tugas dan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		17	Penyediaan Jasa	Meningkatnya pelayanan administrasi dikantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		18	Penyediaan Jasa Publikasi	terpenuhinya keperluan spanduk dan iklan koran	60	12	12	12	100%	12	12	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Tabel VI.

Tabel VI
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun	
					2016	2017	2018	2020	2010		2016	2017	2018	202
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Urusan Perhubungan													
A	SPM													
1	Tersedianya angkutan umum yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	75		%	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,
2	Tersedianya angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dengan wilayah yang telah berkembang yang telah tersedia jaringan jalan	23		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100		%	8	50	100	100	100	100	8	50	100	10
4	Tersedianya terminal angkutan yang telah dilayani angkutan umum	40		%	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60		%	13	15	16	17	18	18	12,7	14,5	17	18
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 1000 (se ribu) kendaraan wajib uji.	60		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10

7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal	50		%	65	65	65	65	65	65	65	65	100	10
8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor	100		%	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Parkir pada Kabupaten/Kota.	40		%	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap	100		%	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
11	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	10
B	IKK													
1	Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)		-	%	6,1	3,3	5	5	5	5	6,1	3,3	5	5
C	Indikator Kinerja RPJMD													
1	Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan			%	61,88	78,55	78,74	95,25	95,49	95,49	61,88	78,55	95,25	95,49
2	Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas			%	38,62	39,08	39,41	40,21	40,7	40,7	38,62	39,08	40,21	40,
3	Capain peningkatan pelayanan angkutan			%	74,8	77,83	77,83	77,83	80,87	80,87	74,8	77,83	77,83	80,87

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, social budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah :

1. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
3. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi social dan sumber-sumber informasi masyarakat.

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya :

1. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;
2. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas;
3. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
4. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
5. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan diwilayah Kabupaten;

6. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
7. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten pada bidang perhubungan.

Adapun faktor - faktor pendorong dalam pelayanan Dinas Perhubungan untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah:

1. Adanya visi dan misi dinas.
2. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan perhubungan .
3. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
4. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.
5. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ;
4. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan teknis, administrasi dibidang perhubungan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tataruang.

2. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan

3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada

Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan
4. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Bidang Perhubungan

B. Program dan Kegiatan

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 sebanyak 3 Program, Adapun Program-program tersebut sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran program “terselenggaranya penunjang urusan Pemerintah Daerah”

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sasaran program “ terselenggaranya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

3) Program Pengelolaan Pelayanan

Sasaran program “terselenggaranya pengelolaan Pelayanan”

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan 3 (tiga) Program di atas, maka rencana kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dari Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “*Predikat SAKIP Dishub dari Inkab, Tingkat penilaian realisasi keuangan, Tingkat penilaian realisasi keuangan, Indeks Kepuasan Pelayanan Internal, Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah, Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah, dan Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik* adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Pen, ganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator kegiatan (Output) “Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan”
Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Sub kegiatan (Output) “dokumen Renstra, Renja, IKU, IKI dan KAK”
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Indikator Sub kegiatan (Output “dokumen RKA ”
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Indikator Sub kegiatan (Output “dokumen Perubahan RKA-SKPD ”
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Indikator Sub kegiatan (Output) “dokumen DPA ”
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah dokumen Perubahan DPA ”
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Sub kegiatan (Output) “Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ dan SAKIP ”
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) “laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar Gaji dan tunjangan ASN”

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “Laporan Pengujian/ verifikasi keuangan”

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator Sub kegiatan (Output) “Laporan Keuangan Akhir Tahun”

- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) “dokumen administrasi barang milik daerah dan Laporan Kegiatan”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “Laporan sk tim penghapusan BMD, daftar penghapusan BMD, laporan penghapusan BMD”

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan (Output) “Dokumen administrasi umum dan Laporan Kegiatan”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar Kebutuhan komponen listrik/ penerangan dan Laporan Penggunaan komponen Listrik”

- b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar kebutuhan barang cetakan / penggandaan dan Laporan penyediaan barang cetakan”

- c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator Sub kegiatan (Output) “daftar kebutuhan buku-buku/ bahan bacaan dan Laporan penyediaan buku-buku/ bahan bacaan”

- d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar Rapat SKPD dan Daftar Perjalanan Dinas”

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator kegiatan (Output) “Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Laporan kegiatan”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub kegiatan (Output) “Dokumen Pengadaan peralatan dan mesin lainnya”

- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan (Output) “Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar penggunaan jasa surat menyurat”

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar penggunaan telepon dan internet, daftar penggunaan Air ledeng dan daftar penggunaan daya listrik”

- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar pegawai Non ASN dan Laporan Sasaran Kinerja Pegawai non ASN”

- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan (Output) “Dokumen Pemeliharaan dan Laporan Kegiatan”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dan Laporan pemeliharaan kendaraan dinas”

- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator Sub kegiatan (Output) “Daftar kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya”

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “*Porsentase tersedianya Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)*” adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:

1) Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota

Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah fasilitas prasarana jalan(rambu-rambu lalu lintas) yang disedia”

b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota

Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah fasilitas perlengkapan Jalan di jalan (PJU) yang terpasang”

c. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan

Indikator Sub kegiatan (Output)” jumlah fasilitas perlengkapan Jalan di jalan (PJU yang terpelihara”

2) Kegiatan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah Gedung terminal yang direhabilitasi dan terpelihara”

3) Kegiatan Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator Sub kegiatan (Output) “jumlah kegiatan pengawasan dan penertiban perparkiran”

- 4) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator Sub Kegiatan (Output) “jumlah unit sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia”

- b. Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji

Indikator Sub Kegiatan (Output) “jumlah kendaraan bermotor wajib uji”

C. Program Pengelolaan Pelayaran

Capaian program ini diukur melalui indikator sasaran program “*persentase tersedian Fasilitas ASDP*” adapun kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut ini:

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah lokasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan ASDP”

- 2) Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan (Output) “terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota”

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah lokasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek di Kabupaten Kapuas Hulu”

- 3) Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Adapun Sub kegiatan untuk melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah tambatan Perahu yang dibangun”

- b. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator sub kegiatan (Output) “jumlah Dermaga yang dipelihara

- **Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022**

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana Tabel VIII di bawah.

Tabel VIII
Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Target
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	38.000.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	

	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	15.500.000
3	Retribusi Terminal	
	Pelayanan tempet parkir untuk kendaraan penumpang dan Bis	7.000.000
4	Retribusi Pelabuhan	
	Restribusi Jasa ke Pelabuhan	23.000.000
5	Restribusi Penyeberangan air	
	Restribusi Penyeberangan air	40.000.000
6	Restribusi Izin Trayek	
	Restribusi Izin Trayek Angkutan Umum	1.200.000
Jumlah		124.700.000

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023 KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.184.061.008				20.329.500.000,00
2	15				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN				7.184.061.008				20.329.500.000,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.473.614.208				14.989.500.000,00
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DISHUB 2021	Kabupaten Kapuas Hulu	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dishub 2021	8.557.000	DAU		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dishub 2022	30.000.000,00
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RENSTRA 2021 - 2025 dan RENJA Dishub Tahun 2022	Kabupaten Kapuas Hulu (DISHUB)	Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	2.018000	DAU		Dokumen Renja Dishub 2023	4.000.000,00
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen	Kabupaten Kapuas Hulu (DISHUB)	Tersusunnya Program dan Kegiatan Dishub dalam Dokumen	1.902.000	DAU		Dokumen Perencanaan Kegiatan Dinas Perhubungan	6.500.000,00

						Perencanaan		Perencanaan				Tahun 2023	
				04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu (DISHUB)	Dokumen Evaluasi Dinas Perhubungan	1.305.000	DAU		Dokumen Evaluasi Dinas Perhubungan	6.500.000,00
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu (DISHUB)	Dokumen Singkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	2.008.000	DAU		Dokumen Singkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000,00
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terevaluasinya Kinerja Dinas Perhubungan	Kabupaten Kapuas Hulu (DISHUB)	Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Perhubungan	1.324.000	DAU		Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Perhubungan	6.500.000,00
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DISHUB dan PERDA		Dokumen Administrasi Keuangan DISHUB dan PERDA	2.482.862.008	DAU		Terselenggaranya Administrasi Keuangan DISHUB	29.500.000,00
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Kabupaten Kapuas Hulu (DISHUB)	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	2.277.454.008	DAU		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	0,00
				03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kapuas Hulu (DISHUB)	Terkendalinya Pelaksanaan Tugas ASN	203.580.000	DAU		Terkendalinya Pelaksanaan Tugas ASN	27.000.000,00
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kabupaten Kapuas Hulu (DISHUB)	Tersusunnya Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1.828.000	DAU		Tersusunnya Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2.500.000,00
2	15	01	02.03		Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan/ Prosentase Penyusunan/Pendataan dan Pengelolaan Aset DISHUB		Dokumen laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	46.206.400	DAU		Dokumen laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	60.000.000,00
				01	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dan Terdatanya Aset DISHUB	Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi dan Pusat	Dokumen Aset Dinas Perhubungan	46.206.400	DAU		Dokumen Aset Dinas Perhubungan	60.000.000,00
2	15	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	15	01	02.05	02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Kelengkapannya					DAU		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta	125.000.000,00

												Kelengkapan nya	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor		Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	151.414.000	DAU		Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	12.690.000.000,00
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya daya dukung pelayanan perkantoran	Kabupaten Kapuas Hulu	Peralatan Listrik	2.658.000	DAU		Peralatan Listrik	3.000.000,00
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya daya dukung pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kapuas Hulu	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000	DAU		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000,00
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya daya dukung pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kapuas Hulu	Barang Cetak	16.870.000	DAU		Barang Cetak	23.000.000,00
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bertambahnya wawasan aparatur Dishub untuk meningkatkan pelayanan	Kabupaten Kapuas Hulu	Koran / Surat Kabar	4.000.000	DAU		Terwujudnya daya dukung pelayanan administrasi perkantoran	4.000.000,00
				08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Snack dan Nasi Kotak	4.950.000	DAU		Jumlah Snack dan Nasi Kotak	6000.000
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	105.456.000	DAU		Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	120.000.000,00
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	terwujudnya Daya Dukung administrasi Sistem Informasi Pemerintah	Kabupaten Kapuas Hlu	Terselenggaranya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Dinas Perhubungan	16.800.000	DAU		Terselenggaranya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Dinas Perhubungan	16.800.000
2	15	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				654.504.000	DAU			1.230.000.000,00
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Peningkatnya Pelayanan Pengawasan Berlalu Lintas	Kabupaten Kapuas Hulu	Tersedianya Kendaraan Beserta Peralatan Pendukung Pemeliharaan PJU	619.524.000	DAU		Tersedianya Kendaraan Pengawasan Lalu Lintas	1.200.000.000,00
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bertambahnya kelengkapan Peralatan Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Tersedianya Penunjang Peralatan Kerja	34.980.000	DAU		Tersedianya Penunjang Peralatan	30.000.000,00

											Kerja	
2	15	01	02.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				749.572.800	DAU		735.000.000,00
				01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya daya dukung pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kapuas Hulu	Tersedianya Matrai	2.650.000	DAU	Tersedianya Matrai	5.000.000,00
				02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya daya dukung pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kapuas Hulu	Rekening listrik, air, telepon dan internet	64.200.000	DAU	Rekening listrik, air, telepon dan internet	80.000.000,00
				04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kegiatan Perkantoran	Kabupaten Kapuas Hulu	Tersedianga Keperluan Pelayanan Kantor	682.722.800	DAU	Tersedianga Keperluan Pelayanan Kantor	650.000.000,00
2	15	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Porsentase jumlah Prasarana perhubungan dalam kondisi baik			370.498.000	DAU		215.000.000,00
				02	penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terwujudnya daya dukung pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kapuas Hulu	Kendaraan dinas / operasional (yang diberikan Jasa Perpanjangan STNK/ PKB dan KIR)	184.508.000	DAU	Kendaraan dinas / operasional (yang diberikan Jasa Perpanjangan STNK/ PKB dan KIR)	200.000.000,00
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya daya dukung pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Kapuas Hulu	Unit Peralatan yang diperbaiki	9.990.000	DAU	Unit Peralatan yang diperbaiki	15.000.000,00
				07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	terpeliharanya Dermaga dan Terminal	Kabupaten Kapuas Hulu	Pemeliharaan Dermaga dan Terminal	14.000.000	DAU	-	0,00
				09	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kapuas Hulu	jumlah unit Pemeliharaan/ rehabilitas Gedung Kantor	162.000.000	DAU	-	0,00
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan			1.540.000.000	DAU	0%	4.055.000.000,00
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	jumlah Fasilitas Perlengkapan jalan dalam Kondisi Baik			1.390.000.000	DAU		1.055.000.000,00
				01	Pembangunan Prasarana	Tersedianya Prasarana Jalan	Kabupaten	Bertambahnya Prasarana	80.000.000	DAU	Bertambahnya	355.000.000,00

					Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	di Jalan Kabupaten/ Kota	Kapuas Hulu	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan	Kabupaten Kapuas Hulu	Bertambahnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	735.000.000	DAU		Bertambahnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.900.000.000,00
				04	Rehabilitas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kabupaten Kapuas Hulu	Terpeliharanya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	575.000.000	DAU		Terpeliharanya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	700.000.000,00
2	15	01	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	jumlah Terminal yang Dibangun			0	DAU		0	0,00
				02	Pembangunan Gedung Terminal	Terselenggaranya Pembangunan Terminal Tipe C	Kabupaten Kapuas Hulu	Terbangunnya Terminal Tipe C	-	DAU		-	0,00
2	15	02	2.04		Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Fasilitas Parkir		Tersedianya Lokasi Farkir	50.000.000	DAU		Tersedianya Lokasi Farkir	60.000.000
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Terkendalinya Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir di wilayah Kab. Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu	Ketertiban Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir sesuai dengan Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2013	50.000.000	DAU		Ketertiban Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir sesuai dengan Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2013	0
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum yang laik jalan			30.000.000,00	DAU			1.250.000.000,00
				01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor On Line	Kabupaten Kapuas Hulu	Terselenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor secara On Line		DAU		Terselenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor secara On Line	850.000.000,00
				06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Teridentifikasinya Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		DAU		Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	400.000.000,00
2	15	2	02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Ketertiban Berlalu Lintas	Kabupaten Kapuas Hulu	9 Lokasi	100.000.000	DAU		10 Lokasi	200.000.000,00
				01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan				100.000.000	DAU			200.000.000,00

					Kabupaten / Kota									
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)Untuk jalan Kabupaten / Kota	Tertibnya Kelancaran berlalu Lintas					DAU		Terminal Type C di Kecamatan Jongkong	150.000.000,00
				01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola ANDALALIN	Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas	Kabupaten Kapuas Hulu	SOP dan Dokumen Standar Analisis Dampak lalu Lintas			DAU		SOP dan Dokumen Standar Analisis Dampak lalu Lintas	150.000.000,00
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Pedesaan								1.600.000.000,00
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Angkutan Umum Dalam Kabupaten	Kabupaten Kapuas Hulu	Mobil Angkutan Desa yang belum terlayani Angkutan Umum 7 Unit			DAK dan DAU		Mobi Angkudes 5 Unit	1.600.000.000,00
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Penertiban Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.170..466.800					1.285.000.000,00
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha	Tertibnya Perizinan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Perseorangan / Badan Usaha			20.000.000					165.000.000,00
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga	Terkendalinya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Kabupaten Kapuas Hulu 7 lokasi	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	20.000.000		DAU		Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	165.000.000,00

					Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota								
2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penertiban Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertibnya Perizinan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Dalam Daerah Kabupaten / Kota			20.446.800				120.000.000,00
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya Penertitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu dan luar daerah 7 lokasi	Pelaku usaha angkutan sungai dan danau Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	20.446.800	DAU		Pelaku usaha angkutan sungai dan danau Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	120.000.000,00
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbanggunya sarana prasarana Sungai dan Danau			158.200.000				1.000.000.000,00
				02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sungai dan Danau	Kabupaten Kapuas Hulu 8 paket	Desa-desa yang masih menggunakan Transportasi Sungai	158.200.000	DAU		Desa-desa yang masih menggunakan Transportasi Sungai	1.000.000.000,00

.Plt Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu

RUDI HARTONO
Pembina TK.I
NIP.19700706 199903 1 008

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan. Renja Tahun 2022 ini merupakan tahun ke – 1 pelaksanaan Renstra.

Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu serta peran aktif stakeholder terkait.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD Kab. Kapuas Hulu,

Putussibau, Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

RUDI HARTONO,SE,M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19610818 199403 1 001